
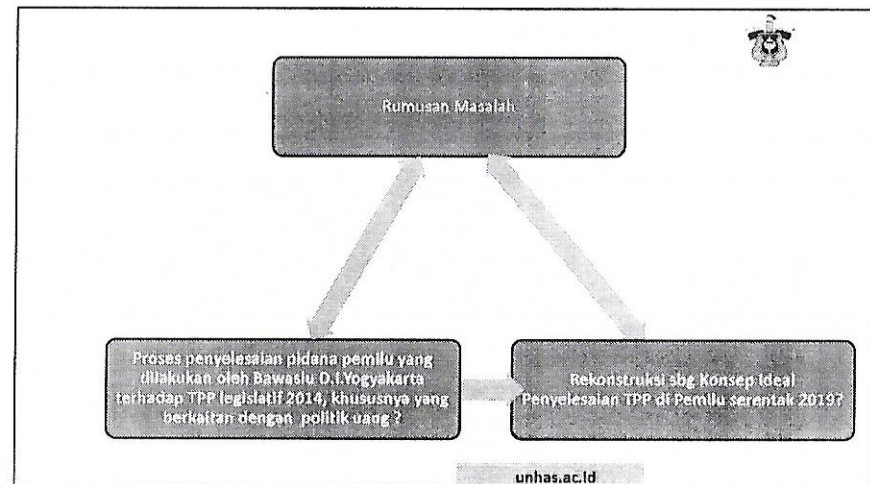
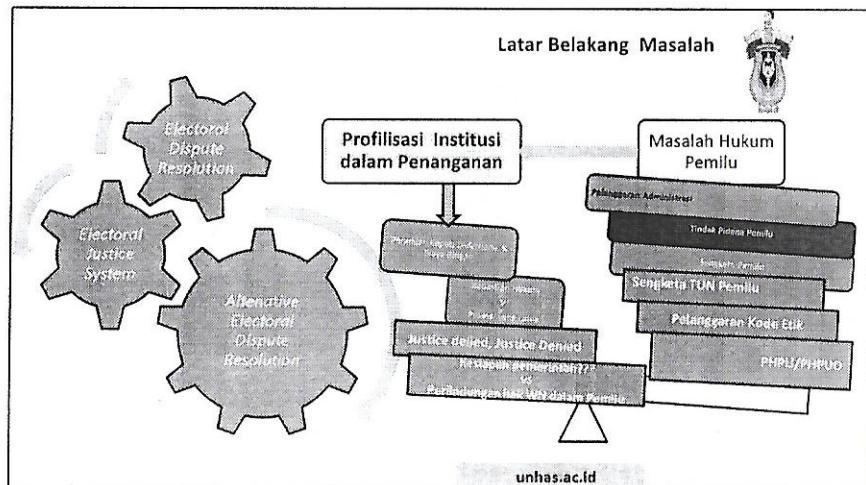
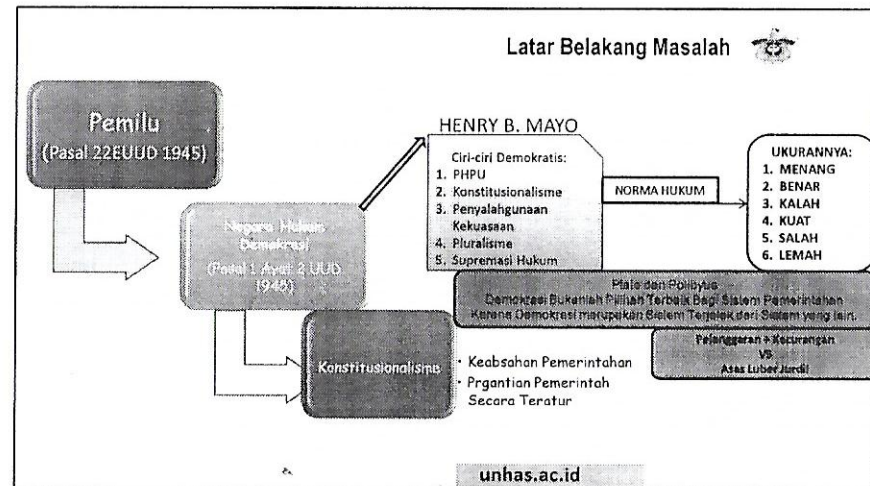


UNIVERSITAS HASANUDIN 

Rekonstruksi Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu di Era Pemilu Serentak 2019

Oleh
Abdul Kadir Jaelani, S.H.
Orin Gusta Andini, S.H.

unhas.ac.id

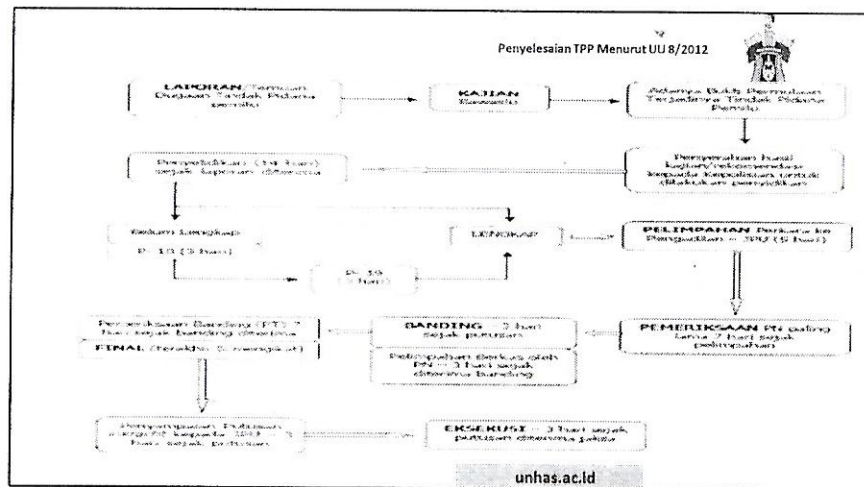
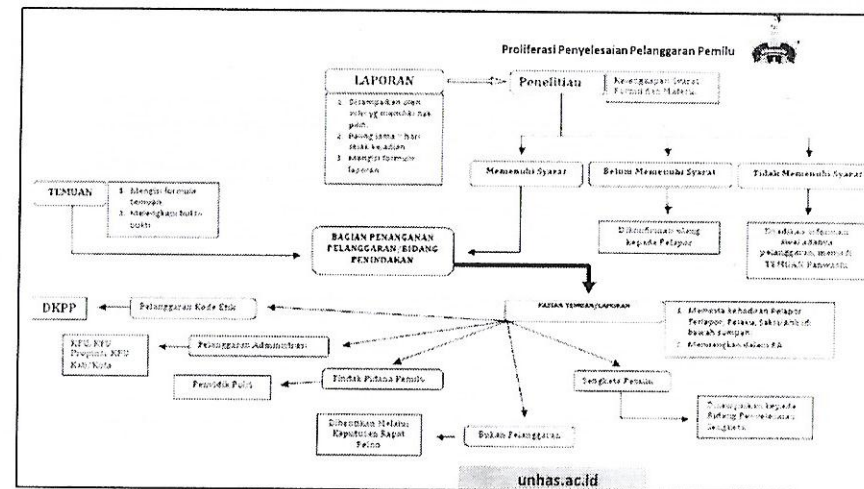


Penyelesaian TPP legislatif 2014 oleh Bawaslu DIY

Panwaslu Kabupaten/ Kota	Pelanggaran Administratif	Sengketa Pemilu	Pelanggaran Kode Etik	Kabupaten/ Kota	
				Panwaslu Kota	Tindak Pidana Pemilu (Money Politics)
Panwaslu Kota	11 kasus	1 kasus	1 kasus	Panwaslu Kota	6 kasus
Panwaslu Sleman	41 kasus	-	-	Panwaslu Sleman	Tidak ada
Panwaslu Bantul	144 kasus	-	-	Panwaslu Bantul	5 kasus
Panwaslu Gunung Kidul	13 kasus	-	2 kasus	Panwaslu Gunung Kidul	3 kasus
Panwaslu Kulon Progo	13 kasus	-	1 kasus	Panwaslu Kulon Progo	3 kasus
Total	222 kasus	1 kasus	4 kasus	Total	17 kasus

TPP (money politics) pada pemilihan legislatif 2014 berjumlah 17 kasus, dan 3 kasus money politics yang masuk ke Bawaslu, karena pembuktian di Bawaslu/ Panwaslu Kabupaten/ Kota sangat sukar dan waktu penyelesaiannya oleh Bawaslu sendiri sangat cepat karena hanya mempunyai waktu 7 hari dari proses pelanggaran

unhas.ac.id



Rekonstruksibg Konsep Ideal Penyelesaian TPP

Masalah Hukum		Pemilihan dan Badan Penyelenggara Pemilu
1	Pelanggaran administrasi pemilu	KPU/KPUD
2	Pelanggaran pidana pemilu	PN, PT, dan MA
3	Sengketa antarpeserta pemilu	Bawaslu/Bawaslu provinsi/panwaslu
4	Sengketa antara penyelenggara dan peserta pemilu	Bawaslu, PTTUN, MA
5	Sengketa antar-penyelenggara pemilu (antara KPU dan KPUD, antara KPU dan Bawaslu, dll.)	?
6	Perselesaian hasil pemilu	MK
7	Pengujian UU pemilu dan UU terkait pemilu	MK
8	Pengujian peraturan KPU dan KPUD	MA
9	Sengketa atas keputusan KPU/KPUD	PTUN, PT, TUN, MA

unhas.ac.id

